

BAB III

SETTING PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lokasinya antara 112°36' hingga 112°54' Bujur Timur dan 07°9' hingga 07°21' Lintang Selatan (BPS Kota Surabaya, 2015). Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan karena sejarahnya yang luar biasa dalam perjuangan Arek-arek Suroboyo—juga dikenal sebagai Pemuda Surabaya—untuk mempertahankan kemerdekaannya dari invasi bangsa penjajah. Surabaya juga menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan pusat perbelanjaan di kepulauan setara dengan Shanghai dan Hong Kong. Selain itu, bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar, Surabaya adalah salah satu dari empat pusat perkembangan awal Indonesia.

Dengan 3.154.162 penduduk pada 2019 (BPS Kota Surabaya, 2019), Kota Surabaya telah menjadi kota metropolis. Surabaya selalu bergerak karena lokasinya yang strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Dengan daya tarik kota Surabaya yang memanjakan berbagai macam kenyamanan, populasinya pasti akan meningkat. Mengubah kehidupan adalah tantangan terbesar selanjutnya. Kota Surabaya harus selalu menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dengan menjadi salah satu kota tropis, Surabaya memiliki dua musim: musim penghujan dan musim kemarau. (DPM-PTSP Kota Surabaya, 2017).

3.2 Demografis Kota Surabaya

Di tahun 2013, Kota Surabaya menjadi kota metropolitan yang strategis dengan sekitar 3.200.454 penduduk. Kota Surabaya sebagai pusat bisnis lokal membuatnya selalu berubah. Kota Surabaya menjadi favorit bagi orang dari berbagai daerah karena menjadi pusat aktivitas di wilayah timur. Seiring dengan pesona Kota Surabaya yang menjanjikan banyak kemudahan, jelas populasinya akan meningkat. Menyediakan kehidupan yang layak adalah tantangan besar berikutnya. Kota Surabaya harus tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tinggal.

Menurut data bps.go.id, total jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 adalah sebanyak 3.009.286 jiwa dengan rincian 1.490.358 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.518.928 penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Angka kelahiran bayi di Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ada 179.901 bayi lahir yang tercatat dan dilaporkan ke kecamatan. Sedangkan, pada tahun 2023 hanya ada sekitar 92.586 bayi yang kelahirannya tercatat dan dilaporkan ke kantor kecamatan yang ada di seluruh Kota Surabaya

3.3 Gambaran Umum Kelurahan Tegalsari

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Keputran sendiri merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tegalsari Surabaya. Wilayah Kelurahan Keputran tercatat memiliki 47 RT dan 6 RW. Kelurahan ini letaknya cukup strategis karena

berada dekat dengan pusat kota dan memiliki luas wilayah kelurahan sebanyak 12% dari jumlah keseluruhan wilayah Kecamatan Tegalsari.

Berdasarkan data dari Dispendukcapil Kota Surabaya, pada 2019 jumlah populasi di Kota Surabaya tercatat berjumlah 3.154.162 jiwa yang mana terdiri dari 1.568.259 jiwa populasi pria dan 1.585.903 jiwa populasi wanita dan terdiri atas 971.850 RT/Kartu Keluarga. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa di tahun 2019 jumlah populasi mengalami pertumbuhan tertinggi jika dibanding dengan sebelumnya di tahun 2016, 2017, dan 2018.

Dari data yang diketahui jumlah penduduk Kelurahan Keputran pada tahun 2021 sebanyak 15.102 jiwa yang terdiri atas 7.428 penduduk laki-laki dan 7.674 penduduk perempuan yang tersebar di 47 Rukun Tetangga (RT). Dari total jumlah penduduk tersebut, sekitar 10.101 orang berada di usia kerja. Semakin bertambahnya jumlah populasi di Kota Surabaya ternyata mendapatkan tantangannya sendiri, sebab dengan meningkatnya angka populasi harus sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk dapat hidup dengan layak serta memiliki keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Dari data yang tercatat dalam 'Surabaya dalam Angka 2023' jumlah anak berusia balita sebanyak 197.192 jiwa. Sedangkan, jumlah remaja yang ada di Kota Surabaya selama tahun 2023 adalah sebanyak 483.871 jiwa. Besarnya angka kelahiran harus dibarengi dengan kesiapan orang tua. Banyaknya pasangan yang menikah di usia muda dikhawatirkan masih belum siap untuk memiliki buah hati. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya 1000 HPK dan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kelas parenting bagi para orang tua baru juga sangat diperlukan agar para orang tua bisa

mengetahui gaya parenting yang paling cocok untuk anak mereka. Bagi remaja, perlu adanya sosialisasi mengenai pencegahan kenakalan remaja terlebih lagi mereka tinggal di kota besar dengan pergaulan yang bisa dibilang bebas.

3.4 Bina Keluarga Balita

Tujuan umum BKB HI (BKB HI) adalah terselenggaranya pengasuhan positif pada ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan untuk percepatan penurunan stunting. Sedangkan tujuan khusus dari program ini adalah;

1. Terpenuhinya kebutuhan pengasuhan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan;
2. Terselenggaranya pengasuhan ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan secara terintegrasi dan selaras antar layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
3. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran BKB HI (BKB HI) bukan hanya ibu dan balita saja, akan tetapi juga meliputi:

1. Orang tua, pengasuh dan keluarga dengan ibu hamil dan mempunyai anak usia 0-23 bulan;
2. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kaderkader masyarakat yang sejenis;

3. Penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
4. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
5. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
6. Media massa dan dunia usaha
7. Mitra pembangunan nasional dan internasional

Sejak tahun 1984, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki program Bina Keluarga Balita (BKB). Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota keluarga yang memiliki balita tentang cara terbaik untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal. Kegiatan ini berbasis kelompok dan dilakukan secara masyarakat. Untuk memastikan hak tumbuh kembang anak usia dini, Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menetapkan bahwa peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan insentif pendidikan harus dilakukan secara bersamaan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Program BKB sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan program lain seperti Posyandu dan PAUD untuk memenuhi semua kebutuhan anak.

Kader BKB merupakan anggota masyarakat yang bekerja sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar. Agar tujuan program dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan kemampuan para kader dalam menyampaikan Panduan penyuluhan BKB Holistik Integratif Bagi Kader dengan

tujuan untuk memberikan kemudahan kader didalam melakukan kegiatan penyuluhan bina keluarga balita Holistik - Integratif (BKB HI) dan sesuai Perkembangan kebutuhan masyarakat materi pengasuhan kepada anggota kelompok BKB (orangtua dan anggota keluarganya), sehingga para anggota keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membina tumbuh kembang balita dan anak serta dapat memberikan stimulasi yang tepat demi terwujudnya generasi emas yang lebih berkualitas. Dengan demikian, BKKBN bekerja sama dengan Plan Internasional Indonesia membuat Buku Panduan Penyuluhan BKB Holistik Integratif Bagi Kader. Tujuan dari buku ini adalah untuk membantu kader melakukan kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program ini bukanlah tanpa halangan. Setiap daerah memiliki kendala yang berbeda-beda. Walaupun program ini sudah diuji di 8 perwakilan wilayah seluruh Indonesia, tentu masih ada saja kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Kota Surabaya sebagai salah satu kota besar tentunya menginginkan pelaksanaan program bisa terlaksana secara merata. Tapi faktanya, masih ada kendala yang terjadi di tiap kelurahan. Kendala yang ditemui oleh Pak Budi dalam pelaksanaan program BKB di BKB Pertiwi Kelurahan Tegalsari yakni:

1. Alat Permainan Edukatif (APE) kurang

Alat Permainan Edukatif (APE) adalah alat permainan yang dimaksudkan untuk membantu anak-anak usia dini belajar. Pengalaman ini akan membantu meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak, termasuk fisik dan motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Alat

permainan edukatif dapat membantu anak berkembang sesuai usia dan tingkat perkembangan mereka.

Kita akan menemukan dua istilah yang berbeda pada dasarnya proses perkembangan anak dalam kegiatan bermain: Sumber Belajar (Learning Resources) dan Alat Permainan (Educational Toys and Games). Baik alat permainan maupun sumber belajar akan berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan budaya. Oleh karena itu, akan ada banyak alat permainan dan sumber belajar yang baru. Alat permainan edukatif (APE) adalah alat permainan yang digunakan untuk mengajar anak usia dini.

Semua alat bermain yang digunakan oleh anak untuk mengembangkan keterampilan bermainnya disebut sebagai alat permainan. Alat-alat ini memiliki berbagai fungsi, seperti bongkar pasang, mengelompokkan, memadukan, mencari padana, merangkai, membentuk, mengetok, menyempurnakan desain atau menyusun sesuai bentuk utuhnya. Namun, alat permainan edukatif adalah alat yang dapat mendorong aktifitas bermain anak dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan mereka.

APE bukan hanya permainan yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar, tetapi juga alat permainan yang dimaksudkan untuk meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini. APE tidak selalu harus bagus dan murah. Alat permainan tradisional dan buatan sendiri juga dapat dikategorikan sebagai APE asalkan mereka menarik, dapat dimainkan dengan berbagai cara, tidak mudah rusak, dan dapat diterima oleh semua kebudayaan.

APE yang ada di BKB Kit dibagi menjadi beberapa kelompok umur

- 1) Kelompok Umur 0-1 tahun
 - a. Giring-giring / Bola Kerincing
 - b. Boneka Kain
- 2) Kelompok Umur 1-2 tahun
 - a. Puzzle Binatang
 - b. Paku Palu
- 3) Kelompok Umur 2-3 tahun
 - a. Menara Gelang-gelang Ganda
 - b. Lotto Warna
- 4) Kelompok Umur 3-4 tahun
 - a. Balok Ukur
 - b. Kotak Bentuk
- 5) Kelompok Umur 4-5 tahun
 - a. Tangga silinder
 - b. Tangga Kubus
 - c. Kotak Pola
- 6) Kelompok Umur 5-6 tahun
 - a. Permainan angka
 - b. Papan Pasak

Maksud dari pengelompokan APE sesuai umur adalah untuk menstimulasi perkembangan anak sesuai dengan usianya. Bayi usia 0-1 tahun diberi mainan yang

mengenalkan mereka pada bunyi dan bentuk. Setelah sudah dapat mengenali bunyi dan bentuk, pada usia 1-2 tahun mulai diajarkan untuk menyusun bentuk dan menggunakan kekuatan tangan serta belajar menggenggam palu. Hingga nanti mereka berusia 5-6 tahun, mereka mulai diajarkan mengenai angka dan menyusun benda sesuai dengan tempat berdasarkan warna. APE tentu akan sangat membantu perkembangan motorik kasar dan halus pada anak. Anak akan lebih mudah mengenali bentuk, tekstur dan juga warna. Maka dari itu, untuk mensiasati kekurangan APE, BKB yang belum memiliki APE membuat APE sendiri. Biasanya, para kader dan Bunda PAUD memanfaatkan kertas origami, serta mainan plastik atau balok yang dijual di pasaran. Tentunya dengan masih memperhatikan standar yang disarankan oleh BKKBN.

2. Belum Semua Kader Dilatih Secara Teknis

Pelatihan kader diperlukan untuk tercapainya target dan indikasi keberhasilan dari program ini. Akan tetapi, setiap daerah memiliki kesiapan dan anggaran dana yang berbeda. Mekanisme pelatihan yang diberikan pun berbeda menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Pelatihan yang diadakan di Kota Surabaya sendiri dilakukan oleh PKK dengan didampingi oleh BKKBN, peserta yang diperbolehkan hadir pun jumlahnya terbatas, sehingga ada kader yang belum mendapatkan pelatihan atau orientasi.

Para Penyuluh KB tentunya sudah mendapatkan penyuluhan terlebih dahulu. Maka dari itu, PKK tiap kecamatan mengadakan pelatihan tersendiri khususnya untuk para kader yang belum mendapatkan pelatihan. Materi yang disampaikan pun sama dengan pelatihan formal yakni 13 materi Bina Keluarga

Balita. Diharapkan, walaupun tidak mendapat pelatihan secara formal para kader tetap mampu menyampaikan materi secara baik dan utuh di BKB Kelurahan masing-masing.

